Kesepakatan Kelola Wisata PT LII di Kepulauan Widi akan Dibatalkan

JAKARTA (IM) - Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan perjanjian yang dibuat Pemprov Maluku Utara dan Kabupaten Halmahera Selatan, atau MoU dengan PT Leadership Islands Indonesia (LII) untuk membangun wisata lingkungan di Kepulauan Widi, dibatalkan.

Perjanjian tersebut dibatalkan karena isinya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Hal itu disampaikan Mahfud setelah menggelar rapat koordinasi lintas Kementerian dan Lembaga di Kemenko Polhukam, Rabu (14/12). Rapat dihadiri Mendagri Tito Karnavian, KSAL Laksamana Yudo Margono, Menteri KLHK Siti Nurbaya, dan pihak KKP.

"Pemerintah akan membatalkan MoU tersebut karena isinya atau prosedurnya tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan isi MoU itu tidak pernah ditepati oleh PT LII. Jadi kita akan membatalkan itu," kata Mahfud seusai rapat.

Menurut Mahfud, ada kesalahan prosedur dalam pembuatan MoU tersebut. Salah satunya tidak adanya izin yang dikeluarkan dari Kementerian KKP.

"Kesalahan prosedur misalnya seharusnya MoU itu dibuat dengan atau atas izin Menteri KKP, seharusnya tapi menteri KKP sampai saat ini tidak mengeluarkan selembar pun surat izin untuk itu," ujarnya.

"Kemudian di tengah objek MoU ada hutan seluas lebih dari 1.900 hektare dan itu sebenarnya tidak boleh," lanjutnya.

Mahfud menegaskan tidak ada pulau yang dijual. Dia memastikan tidak akan ada pulau yang dijual oleh negara. ● **mei**

Kemendagri Serahkan Daftar 204 Juta Penduduk Potensial Pemilih ke KPU

JAKARTA (IM) - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) serahkan daftar penduduk potensial pemilih (DP4) kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Rabu (14/12) untuk keperluan Pemilu 2024.

Wakil Mendagri John Wempi Wetipo menyampaikan, data kependudukan ini dihimpun sampai akhir semester I tahun 2022.

"DP4 Pemilu 2024 berasal dari data kependudukan semester 1 tahun 2022 yang telah diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Dalam Negeri melalui sistem informasi kependudukan secara terpusat dan diperkuat melalui proses perekaman KTP elektronik," kata John dalam sambutannya di Kantor KPU RI pada Rabu (14/12) pagi.

Ia menyampaikan, data by name by address ini juga telah disesuaikan dengan peristiwa-peristiwa kependudukan lain, seperti pindah-datang dan juga kematian. Penduduk yang masuk dalam DP4 adalah WNI yang akan berusia 17 tahun atau lebih pada hari H Pemilu 2024 dan bukan anggota TNI/Polri.

"Kemendagri menyerahkan DP4 untuk Pemilu 2024 kepada KPU dengan jumlah 204.656.053 jiwa, terdiri dari laki laki sebanyak 102.181.591 jiwa dan perempuan sebanyak 102.474.462 jiwa meliputi 38 provinsi," ujar politisi PDI-P itu.

John menyinggung soal pentingnya keamanan data ini karena DP4 meliputi data pribadi masyarakat. Ia mengatakan bahwa keamanan data ini bersifat sangat prioritas.

"Upaya yang sudah dilakukan oleh Kemendagri, di antaranya dengan berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara, Direktorat Tindak Pidana Siber Polri, KPU, Bawaslu, dalam proses teknis enkripsi dan pengamanan datanya," katanya. ● **han**

Wamenkumham Ngaku Tak Risau KUHP Disorot PBB hingga Amerika Serikat

JAKARTA (IM) - Wamenkumham Eddy Hiariej menegaskan dirinya tidak risau pihak asing menyoroti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru. Sebabsubstansi KUHP yang disoroti kebanyakan terkait kesusilaan.

"Yang kedua, ini mengenai substansi. Cuma saya ingin menyoroti dua hal saja, saya sama sekali tidak risau dengan kritikan asing ya, mau PBB, mau Amerika, Australia, Inggris, karena, mengapa saya tidak risau? Saya mohon maaf ya, yang diprotes itu adalah tindak pidana kesusilaan," kata Eddy dalam acara seminar Fraksi PPP di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (14/12).

Eddy mengatakan KUHP di setiap negara memiliki substansi yang cenderung sama. Namun, lanjut dia, ada tiga hal yang substansinya bisa berbeda, yakni politik, penghinaan, dan kesusilaan.

"Kenapa saya tidak risau? Dalam berbagai kesempatan, substansi KUHP di seluruh dunia itu sama, kecuali 3 hal. Yang pertama adalah soal politik. Kedua, soal penghinaan. Ketiga adalah kesusilaan. Pasti satu dengan yang lain berbeda. Jadi saya tidak risau dengan apa yang dikritik," ujarnya.

Eddy lantas meminta substansi mengenai kesusilaan itu tidak dibanding-bandingkan.

"Jadi saya tidak risau. Karena masuk ke kejahatan kesusilaan. Memang itu bukan hal yang dibandingkan, bahwa kesusilaan jangan dibandingkan," ujarnya.

Eddy menyayangkan ada kritik dari dalam negeri yang menurutnya seolah mendukung pihak asing. Menurutnya, hal itu memperlihatkan mental 'inlander' atau kepribumian.

"Hanya saja, yang saya sesali kok ada suara masyarakat yang kemudian seolah-olah mendukung suara-suara Amerika, Prancis, dan Australia. Ini negara ini mohon maaf kita ini mental inlander. Karena terlalu lama ikut dalam di KUHP kolonial, seakan-akan hukum kolonial itu jauh lebih bagus daripada hukum buatan sendiri," ujarnya.

Dengan demikian, Eddy mendukung langkah Kemenlu memanggil perwakilan PBB yang dia anggap mengintervensi hukum di RI.

"Kita punya kedaulatan. Saya kira Kemenlu tegas memanggil perwakilan PBB untuk tidak mengintervensi terhadap hukum Indonesia," katanya. ● **mei**

FOTO: ANTARA

BUKU DOA KHUSUS BAGI PRAJURIT TNI AL

KSAL Laksamana TNI Yudo Margono (ketiga kanan) membaca Buku Doa Khusus Bagi Prajurit TNI AL disaksikan Wakil Ketua Umum MUI Marsudi Syuhud (kedua kanan), Sekjen MUI Amirsyah Tambunan (kanan), Ketua MUI Cholil Nafis (ketiga kiri), Aspers KSAL Laksamana Muda TNI Irwan Achmadi (kedua kiri) dan Kadisbintalal Brigjen TNI (Mar) Sandy M Latief di Kantor MUI, Jakarta, Rabu (14/12). TNI AL dan MUI membuat buku Doa Khusus Bagi Prajurit TNI AL yang berisi panduan doa-doa bagi para prajurit saat menjalankan tugasnya.

Dirut Bantah BPJS Kesehatan Banyak Dipakai Orang Kaya, Sudah *on The Right Track*

Kasus terbanyak yang di-cover oleh BPJS Kesehatan adalah penyakit jantung. Penyakit jantung juga banyak diderita oleh PBI yang ditanggung BPJS.

JAKARTA (IM) - Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti menampik tudingan bahwa layanan BPJS kesehatan banyak dipakai orang kaya. Ditegaskannya, pemakai terbanyak layanan BPJS Kesehatan adalah Peserta Bantuan Iuran (PBI).

Data ini dianalisis dari total 95 juta data terbaru di BPJS Kesehatan selama satu tahun terakhir, yakni dari 2021-2022.

"Kami analisis 95 juta data, datanya berbunyi; satu, pemakaian yang terbesar itu oleh PBI. Jadi, kalau ada diskusi-diskusi (yang menyatakan) bahwa pihak lain bukan PBI yang memakai (layanan) terbanyak, itu salah," kata Ali Ghufron Mukti dalam acara peluncuran Buku Statistik JKN 2016-2021 di Jakarta, Rabu (14/12).

Ali Ghufron merinci, pengguna BPJS yang masuk kategori PBI mencapai 31,93 juta dalam setahun terakhir, dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai lebih dari Rp 27 triliun.

Sementara itu, Pekerja Penerima Upah (PPU) sebesar 28,36 juta kasus dengan total biaya Rp 24,1 triliun. Sedangkan Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) sebesar 26,24 juta kasus dengan biaya lebih dari Rp 20 triliun.

"Kemudian, (peserta) bukan pekerja kasusnya 8 juta dengan biaya Rp 5 triliun," ujar Ali Ghufron.

Lebih lanjut, Ali Ghufron mengungkapkan, penyakit dengan kasus terbanyak yang di-cover oleh BPJS Kesehatan adalah jantung. Penyakit jantung ini juga banyak diderita oleh PBI yang ditanggung BPJS.

"Siapa yang penyakit jantung (di-*cover*) paling banyak? Ternyata adalah PBI. Jadi negara sudah *on the right track*. Jadi, BPJS yang sudah bisa dirasakan untuk tidak perlu diubah secara fundamental, tapi diperbaiki," katanya.

Ali Ghufron mengungkapkan, kasus penyakit jantung yang diderita PBI mencapai 4.285.518 kasus dengan total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 3,26 triliun. Lalu, penyakit jantung yang diderita oleh PBPU mencapai 4 juta kasus dengan biaya Rp 2,91 triliun.

Untuk PPU/BU (Badan Usaha), kasusnya 1 juta lebih dengan biaya Rp 981 miliar, dan PBU/PN (Pegawai Negeri) mencapai 1.893.620 kasus dengan biaya Rp 1,5 triliun.

"Belum pernah ke luar data ini, karena baru kami analisis dan kita keterbukaan tidak saja data statistik ini, tapi juga kita berikan akses untuk data sampel," ujar Ali.

Sebelumnya, publik gaduh karena BPJS Kesehatan disebut-sebut banyak meng-*cover* orang kaya. Kegaduhan bermula ketika Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pernyataan tersebut di Rapat Kerja Komisi IX DPR RI beberapa waktu lalu.

Dalam klarifikasinya, Budi Gunadi mengatakan bahwa layanan BPJS Kesehatan adalah hak semua elemen masyarakat, baik kaya maupun miskin. Kendati begitu, BPJS harus didesain dengan baik. Pembebanan klaim yang terlalu tinggi oleh asuransi sosial itu dikhawatirkan merusak sustainabilitas, menyusul banyaknya perusahaan asuransi yang bermasalah seperti Jiwasraya dan Bumiputera.

"BPJS harus melayani seluruh masyarakat Indonesia, baik miskin dan kaya. Idealnya, saya ulangi, BPJS harus meng-cover 270 juta rakyat Indonesia siapapun dia. Cuma dia harus didesain dengan baik," kata Budi Gunadi saat ditemui di Hotel Shangri La Jakarta, Jumat (25/11) lalu.

Budi Gunadi mengungkapkan, layanan kesehatan yang dicover BPJS saat ini terlampau luas. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kelas dalam BPJS Kesehatan, yakni Kelas I, Kelas II, dan Kelas III. ● **han**

FOTO : ANT

PELUNCURAN SURVEI PENILAIAN INTEGRITAS

Ketua KPK Firli Bahuri (kedua kanan) menyerahkan piagam penghargaan kepada Wali Kota Madiun Maidi (kanan) disaksikan Gubernur Bali Wayan Koster (kiri) dan Bupati Boyolali M Said Hidayat (kedua kiri) sebagai daerah dengan indeks korupsi terbaik saat peluncuran Survei Penilaian Integritas (SPI) di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (14/12). Berdasarkan SPI yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) indeks nasional SPI tahun 2022 sebesar 71,94.

KPK Ambil Sampel Suara Bupati Bangkalan

JAKARTA (IM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil sampel suara Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron atau Ra Latif dan sejumlah bawahannya. Pengambilan sampel suara untuk kebutuhan berkas penyidikan.

Ra Latif ditetapkan sebagai tersangka suap lelang jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan.

"Tim penyidik melakukan pemeriksaan pada tersangka Ra LAtif dan kawan-kawan di antaranya pengambilan sampling suara untuk kebutuhan kelengkapan pemberkasan perkara penyidikan," kata Juru Bicara Penindakan dan Kelembagaan KPK Ali Fikri, dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Rabu (14/13).

Ra Latif telah diperiksa penyidik KPK dalam kapasitasnya sebagai tersangka pada Selasa (13/12) lalu.

Dalam perkara ini, Ra Latif diduga memerintahkan bawahannya untuk melakukan lelang jabatan guna mengisi jabatan pimpinan tinggi (JPT) di Pemkab Bangkalan. Ra Latif kemudian meminta sejumlah uang kepada setiap aparatur sipil negara (ASN) yang ingin dinyatakan lolos seleksi tersebut.

Sejumlah ASN kemudian menyetujui pembayaran *commitment fee* tersebut. Mereka adalah Agus Eka Leandy, Wildan Yulianto, Achmad Mustaqim, Hosin Jamili, dan Salman Hidayat.

"Untuk dugaan besaran nilai commitment fee tersebut dipatok mulai dari Rp 50 juta sampai dengan Rp 150 juta," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Kamis (8/12) lalu.

Selain lelang jabatan, Ra Latif juga diduga mengutip 10 persen dari nilai proyek yang dilakukan di semua dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan. Jumlah keseluruhan suap yang diterima Latif diduga sebesar Rp 5,3 miliar.

Sebagian uang itu digunakan untuk kepentingan pribadi, salah satunya untuk melakukan survei elektabilitas. "Sedangkan penggunaan uang-uang yang diterima tersangka Ra Latif tersebut diperuntukkan bagi keperluan pribadi, diantaranya untuk survei elektabilitas," ujar Firli. ● **han**

KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Rp63 Miliar ke 6 Instansi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyerahkan aset rampasan dari kasus korupsi senilai Rp 63 miliar, tepatnya senilai Rp 63.381.635.000, kepada enam instansi, termasuk kementerian.

Instansi tersebut antara lain Kementerian Agama, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Komisi Yudisial, Pemerintah Kota Singkawang, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Serah terima dilakukan secara langsung oleh Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan instansi tersebut.

"Kami berharap semoga dengan adanya serah terima ini dapat meningkatkan kinerja serta mempererat hubungan kerja antarlembaga khususnya dengan KPK," kata Firli di Singkawang, Kalimantan Barat, sebagaimana dikutip dari keterangan resmi, Selasa (13/12).

Firli mengatakan, aset senilai miliaran rupiah itu diserahkan melalui mekanisme penetapan status penggunaan (PSP) dan hibah. Tujuannya, instansi terkait bisa memanfaatkan aset-aset itu dengan sebaik-baiknya.

Menurut Firli, serah terima ini merupakan pelaksanaan harta rampasan ini berdasar pada empat Keputusan Menteri Keuangan pada PSP dan dua Persetujuan Menteri Keuangan pada hibah.

Rinciannya, PSP yang diserahkan kepada Kementerian agama senilai Rp 1.580.368.000, Komisi Yudisial Rp 6.786.004.000, KKP Rp 32.816.203.000, BKN Rp 19.073.034.000, Pemerintah Kota Singkawang Rp 1.767.846.000, dan Pemerintah Kabupaten Kebumen senilai Rp 1.358.180.000.

Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar mengatakan, pihaknya akan memanfaatkan aset tersebut untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaganya.

"Dengan nilai total aset sekitar Rp 6,7 miliar di Surabaya, bagi kami merupakan 'hadiah' bagi KY untuk menjalankan tugas, yang di kondisi saat ini, sangat dinanti perannya oleh para pencari keadilan," ujar Mukti.

Sementara itu, Wakil Ketua Menteri Agama Zainut Tauhid mengapresiasi penyerahan aset tersebut. Menurut dia, Kementerian Agama sudah tiga kali menerima aset rampasan negara.

Zainut berharap, pihaknya masih bisa menerima aset rampasan negara. Sebab, Kementerian Agama membutuhkan banyak lahan untuk layanan bidang agama dan pendidikan keagamaan.

"Dalam data kami setidaknya ada 1.043 KUA yang belum mempunyai lahan padahal KUA adalah ujung tombak pelayanan terhadap umat," ujarnya. ● **mei**

PENGUMUMAN

Hasil Pemberesan Pembubaran Dan Likuidasi PT ABADI MUKTI REALTY bahwa Likuidator PT ABADI MUKTI REALTY berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Pulo Gadung, Pulo Mas Blok X/4-5 Jakarta Timur. Dengan ini mengumumkan tentang rencana pemberesan harta kekayaan Perseroan PT ABADI MUKTI REALTY (Dalam Likuidasi);
Demikian hal ini diumumkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 Undang-undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jakarta, 15 Desember 2022
Likuidator

PENGUMUMAN

Hasil Pemberesan Pembubaran Dan Likuidasi PT CXA TEKNOLOGI INDONESIA bahwa Likuidator PT CXA TEKNOLOGI INDONESIA berkedudukan di Gd JSC Hive, Jl Prof DR Satrio No 7, Karet Kuningan, Setia Budi, Jakarta Selatan. Dengan ini mengumumkan tentang rencana pemberesan harta kekayaan Perseroan PT CXA TEKNOLOGI INDONESIA (Dalam Likuidasi);
Demikian hal ini diumumkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 Undang-undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jakarta, 15 Desember 2022
Likuidator

PENGUMUMAN

Hasil Pemberesan Pembubaran Dan Likuidasi PT DOCQUITY CONSULTING INDONESIA bahwa Likuidator PT DOCQUITY CONSULTING INDONESIA berkedudukan di 18 Parc Place Tower E, Jl. Tulodong Bawah No.5, Kel. Senayan, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dengan ini mengumumkan tentang rencana pemberesan harta kekayaan Perseroan PT DOCQUITY CONSULTING INDONESIA (Dalam Likuidasi);
Demikian hal ini diumumkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 Undang-undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jakarta, 15 Desember 2022
Likuidator

PENGUMUMAN

Hasil Pemberesan Pembubaran Dan Likuidasi PT HARES ABADI SEJAHTERA bahwa Likuidator PT HARES ABADI SEJAHTERA berkedudukan di Komp Rukan Gading Bukit Indah Blok TB No 21, Jl Bukit Gading Raya, Kel. Kelapa Gading Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dengan ini mengumumkan tentang rencana pemberesan harta kekayaan Perseroan PT HARES ABADI SEJAHTERA (Dalam Likuidasi);
Demikian hal ini diumumkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 Undang-undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jakarta, 15 Desember 2022
Likuidator

PENGUMUMAN

Hasil Pemberesan Pembubaran Dan Likuidasi PT KARYA DAMAI SEJAHTERA bahwa Likuidator PT KARYA DAMAI SEJAHTERA berkedudukan di Jl. Raya Kalibata No.10F, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur. Dengan ini mengumumkan tentang rencana pemberesan harta kekayaan Perseroan PT KARYA DAMAI SEJAHTERA (Dalam Likuidasi);
Demikian hal ini diumumkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 Undang-undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jakarta, 15 Desember 2022
Likuidator

PENGUMUMAN

Hasil Pemberesan Pembubaran Dan Likuidasi PT PAPERA INTERNUSA SEJAHTERA bahwa Likuidator PT PAPERA INTERNUSA SEJAHTERA berkedudukan di Jl RC Veteran 07, Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Dengan ini mengumumkan tentang rencana pemberesan harta kekayaan Perseroan PT PAPERA INTERNUSA SEJAHTERA (Dalam Likuidasi);
Demikian hal ini diumumkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 149 Undang-undang Perseroan Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Jakarta, 15 Desember 2022
Likuidator

PENGUMUMAN
HASIL PENGGABUNGAN YAYASAN PRAMBANAN, YAYASAN ISLAM TELADAN, DAN YAYASAN GAJAH SAKTI LAMPUNG KE DALAM YAYASAN PRASETIYA MANDIRI

Guna memenuhi ketentuan dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan juncto Pasal 33 PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, Pengurus Yayasan Prasetiya Mandiri ("YPM") sebagai Yayasan yang menerima penggabungan, dengan ini mengumumkan hasil penggabungan Yayasan Prambanan ("YP"), Yayasan Islam Teladan ("YIT"), dan Yayasan Gajah Sakti Lampung ("YGSL") ke dalam YPM, sebagai berikut :
1. Pada tanggal 08 Desember 2022 telah dibuat Rancangan Penggabungan yang telah disetujui oleh Pembina dari masing-masing Yayasan.
2. Masing-masing Pembina Yayasan telah mengambil keputusan yang pada prinsipnya menyetujui Rancangan Penggabungan dan Penggabungan.
3. YP, YIT, YGSL dan YPM telah menanda-tangani Akta Penggabungan tanggal 13 Desember 2022, Nomor : 13, yang dibuat di hadapan DEWI INDRIANI, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi.
4. Berdasarkan ketentuan dalam Akta Penggabungan tersebut, Penggabungan mulai efektif yaitu sejak tanggal 13 Desember 2022.

Dengan demikian, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2022 :
1. Semua aktivitas, kegiatan, operasional, tagihan-tagihan, karyawan, aktiva dan pasiva YP, YIT, dan YGSL karena hukum beralih ke YPM; dan
2. YP, YIT, dan YGSL bubar tanpa terlebih dahulu mengadakan likuidasi.

Demikian pengumuman ini dibuat dan disampaikan agar semua pihak yang berkepentingan dapat mengetahuinya.
Bogor, 15 Desember 2022
Pengurus YAYASAN PRASETIYA MANDIRI

PENGUMUMAN PEMBUBARAN YAYASAN MUDITACITTA KARUNA INDONESIA

Bahwa **YAYASAN MUDITACITTA KARUNA INDONESIA** berkedudukan di Jakarta Barat, telah dibubarkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina, Nomor : 05, tanggal 14 Desember 2022, dibuat oleh DEWI KRISTIANA, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Bandung Barat, serta telah menunjuk JOHANA HALIM, S.E sebagai Likuidator Yayasan, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Jakarta, 15 Desember 2022
LIKUIDATOR
YAYASAN MUDITACITTA KARUNA INDONESIA (Dalam Likuidasi)
Jl. Mangga Besar 6 Utara Nomor 50, Taman Sari, Jakarta Barat